BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data terbaru pada situs resmi Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan, potensi sumber daya ikan di perairan laut Indonesia diperkirakan 7,3 juta ton/tahun. Jika dinilai secara ekonomi, potensi kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan hingga 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau setara 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 (djpt.kkp.go.id:2014). Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati yang tinggi dan potensi sumber daya alam melimpah. Sejumlah 17.499 buah pulau dimiliki Indonesia, dengan panjang garis pantai membentang sepanjang 80.791 km (terpanjang setelah Kanada), dan total luas laut hingga 3,25 juta km² atau menjadikan 3/4 wilayah Indonesia merupakan perairan (Kelautan dan Perikanan dalam angka, 2013:76).

Selain itu juga mengenai kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) kelautan Indonesia adalah terbesar di dunia (Dahuri *et al*. 1996), tercermin pada keberadaan ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan berbagai jenis ikan baik hias maupun konsumsi. Dari 7.000 spesies ikan dunia 2.000 jenis diantaranya berada di Indonesia (Lasabuda, 2013:93). Dengan demikian, tidak mengherankan jika Negara Indonesia dikatakan memiliki akar budaya maritim kuat dan pernah berjaya pada masa kerajaan Nusantara,

dimana pusat ekonomi dan peradaban yang kuat selama berabad-abad, menjadikan sumberdaya kelautan sebagai sumber pertumbuhan dalam mencapai kemakmuran dan kemajuan peradaban (Dahuri 2003 dalam Salim, 2010:5).

Melihat potensi perikanan dan kelautan yang besar sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya sektor perikanan dan kelautan dapat dijadikan sebagai salah satu sektor riil yang potensial dan dapat diletakkan sebagai kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia. Karena itu, Daryanto (2007) dalam Putra (2011:3) berargumentasi bahwa sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Lebih lanjut Daryanto (2007) menjelaskan hal ini didasarkan adanya:

> Pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan Keempat, Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada.

Dalam konteks inilah Kusnadi (2003:102) menegaskan dimana perlu adanya perubahan orientasi pembangunan bangsa Indonesia dari orientasi daratan (*land based orientation*) ke orientasi kelautan (*ocean based orientation*). Sehingga, negara dan rakyat dituntut mampu mengelola dan memanfaatkan secara optimal sekaligus tetap memperhatikan hak-hak tradisional, nasional dan internasional, serta menjamin pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Meskipun negara kepulauan dengan sumberdaya kelautan yang besar, sebenarnya potensi tersebut belum termanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa (Rudyanto, 2004:1). Potensi yang telah dikelola dan dimanfaatkan masih kurang dari 10 persen (djpt.kkp.go.id:2014). Biarpun sejumlah keberhasilan tercapai seperti peningkatan produksi, nilai dan laju ekspor tetapi pembangunan kelautan dan perikanan masih menyisakan permasalahan serius misalnya *overfishing*, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan kemiskinan sebagian besar nelayan (Bengen, 2010:2).

Selaras dengan beberapa persoalan yang dikemukakan, kemiskinan masyarakat nelayan merupakan persoalan yang kompleks, dalam hal ini Salim (1984:40) menyatakan bahwa kemiskinan tersebut melekat atas diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, akibatnya mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung dan pangkal. Padahal berdasarkan logika berfikir Nurkse 'lingkaran setan kemiskinan', rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (Kuncoro, 2006:120).

Penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan/pesisir masih menjadi *keyword* dalam kerangka pembangunan wilayah pesisir dan kelautan. Seperti halnya masyarakat pada umumnya, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah tantangan misalnya politik, sosial dan ekonomi yang kompleks dan berpengaruh terhadap eksistensinya sebagai manusia yang berhak sejahtera. Kusnadi, (2009:27-28) melukiskannya berikut ini:

> (a) Kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat; (b) Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar

sehingga mempengaruhi dinamika usaha; (c) Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi; (d) Kualitas sumberdaya mayarakat yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; (e) Degradasi sumberdaya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut, maupun pulau-pulau kecil; dan (f) Belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan Nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 11.884 desa tepi laut di 2.118 Kecamatan pesisir, dari 497 terdapat 318 (64%) kabupaten/kota diantaranya berada di wilayah pesisir (Kelautan dan Perikanan dalam angka, 2013:76). Hal ini menunjukkan, sebetulnya daratan Indonesia didominasi dan berada di kawasan pesisir. Ternyata fakta empiris juga ditampilkan dari tingginya angka kemiskinan masyarakat nelayan dan wilayah pesisir. Hal ini ditandai dari 31,02 juta penduduk miskin Indonesia sejumlah 7,87 juta jiwa (25,14%) merupakan nelayan dan masyarakat pesisir (antarajatim.com:2013). Hal ini dikuatkan pula adanya pernyataan BPS dalam situs berita *solopos.com* menyatakan bahwa nelayan Indonesia masih tergolong kelompok masyarakat miskin dengan pendapatan perkapita perbulan sekitar US$7-US$10 (solopos.com: 2013).

Karenanya, pemerintah berupaya banyak dalam mengentaskan kemiskinan melalui program-program baik bersifat secara langsung sebagai aktor maupun sebagai fasilitator di daerah dan terutama pada wilayah pesisir. Dasar hukum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan:

a) Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, tanggal 25 Februari 2010;
b) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, tanggal 21 April 2010;
c) Hasil rapat kabinet pada 13 Februari 2011 tentang evaluasi kebijakan penurunan tingkat kemiskinan; serta

d) Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang tim koordinasi peningkatan dan perluasan program pro-rakyat (Petunjuk teknis KIMBis, 2011).

Dasar hukum di atas adalah landasan dalam serangkaian upaya pengentasan kemiskinan pada berbagai wilayah di Indonesia. Khusus pada sektor kelautan dan perikanan, program pengentasan kemisinan diarahkan melalui Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), salah satu kegiatannya adalah tentang mata pencaharian alternatif. Dengan demikian, maka pada kawasan pedesaan pesisir terdapat berbagai program pembangunan dari berbagai sektor yang sasarannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Pada bagian lain, strategi pada tingkat pusat dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter, sedangkan pada tingkat daerah pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin).

Menyadari pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan pada tingkat daerah, maka kawasan pesisir dan nelayan dikhawatirkan juga berpeluang terdampak negatif terhadap kemandirian masyarakat (individu) untuk mengakses sumberdaya dan perekonomian. Penelitian yang dilakukan Muktasam (2012) tentang evaluasi program pengentasan kemiskinan mengungkapkan:

> Keberhasilan dan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah seperti halnya Raskin, BLT, PUAP, KUBE, Jamkesmas, dan PNPM menunjukkan bahwa faktor-faktor ketidakberhasilan program antara lain kurangnya partisipasi, pendekatan yang *top-down*, tidak sesuainya antara program dengan kebutuhan real masyarakat, terbatasnya koordinasi antar lembaga, dan tidak adanya budaya pembelajaran dalam masyarakat dan organisasi.

Hasil studi ini memberikan arti penting pendekatan yang efektif dalam program pengentasan kemiskinan antara lain dengan mengedepankan pentingnya partisipasi masyarakat miskin, kerjasama, koordinasi yang efektif semua pihak, dan proses pembelajaran masyarakat dan organisasi. Hal ini dikarenakan gambaran lingkungan sosial masyarakat nelayan tampaknya cenderung berkelompok atau berkomunitas. Sehingga, untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan wilayah perikanan dan kelautan di Indonesia maka diperlukan paradigma dan strategi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses pembangunannya.

Friedman (1992) dalam Suryono (2010:55) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan dianggap sebagai alternatif pembangunan yang dapat menjawab permasalahan kemiskinan di negara berkembang. Melihat hal itu, Gajanayake (1993:6) berpendapat bahwa pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasi. Hal ini berimplikasi pada kegiatan memampukan masyarakat untuk memahami realitas pada lingkungannya, menentukan refleksi pada faktor-faktor yang menentukan lingkungannya dan meletakkan langkah-langkah untuk merubah efek dengan merubah situasi. Sejalan dengan hal tersebut, Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto dan Soebiato (2012:31) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Dengan demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan membentuk Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Nomor 12.1/BALITBANGKP/RS.210/I/2012 tentang pembentukan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam mendukung Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) BBPSEKP menjelaskan bahwa Klinik IPTEK Mina Bisnis adalah:

> Wadah komunikasi, advokasi/pendampingan, serta konsultasi antara kelompok masyarakat nelayan yang beraktivitas di daerah pesisir dengan stakeholder terkait, melalui pendekatan *techno-preneurship* untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat nelayan. Klinik IPTEK Mina Bisnis dapat menjadi bagian atau cikal bakal dari pengembangan kegiatan dalam bentuk kerjasama melalui *Research Extension Fisheries Community Network* (REFINE). Pada kegiatan REFINE tersebut, peneliti – penyuluh – pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan, pengolah, pedagang, dan investor) melakukan kegiatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat melalui intervensi paket teknologi Badan Litbang Kelautan dan Perikanan yang terpilih, membangun jaringan kerja, dan renovasi paket teknologi yang diintroduksi (Petunjuk teknis KIMBis, 2011)

Melalui hal di atas, keberadaan Klinik IPTEK Mina Bisnis pada pusat-pusat produksi kelautan dan perikanan diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan terutama mendorong percepatan peningkatan produksi, mendukung pengembangan industrialisasi perikanan, mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan, sebagai salah satu *implementing agency* program peningkatan kehidupan nelayan (Modul Peran, Tugas, dan Fungsi dalam KIMBis, 2012).

Menurut Agus Heri Purnomo, yang menjabat sebagai Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) pada saat Klinik IPTEK Mina Bisnis dibentuk:

> Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) merupakan bentuk kelembagaan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Prinsipnya, klinik IPTEK untuk mendorong kehidupan ekonomi masyarakat di pedesaan dan dapat dimanfaatkan menjadi balai pusat pemberdayaan sekaligus pusat belajar masyarakat perikanan atau nelayan. Pusat pemberdayaan tersebut, menjadi pusat referensi dan pusat pembelajaran secara teknis. Bila klinik menjadi pusat pemberdayaan, maka bukan hanya di laut yang menghasilkan ikan, tetapi di darat dengan rekayasa akan menghasilkan ikan yang luar biasa besar potensinya (Majalah Mina Bahari, edisi April 2012:26)

Pelaksanaan awal kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis pada tahun 2011 dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi. Lokasi kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Lokasi Pelaksanaan Klinik IPTEK Mina Bisnis tahun 2011 (di awal pembentukan)

No.	Provinsi	Kabupaten	Lokasi
1.	Jawa Barat	Indramayu	Desa Eretan Wetan, Kec. Kandanghaur
2.	Jawa Barat	Subang	Desa Muara, Kec. Blanakan
3.	Jawa Timur	Lamongan	Desa Weru, Kec. Paciran
4.	Jawa Timur	Pacitan	Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan
5.	Sulawesi Tenggara	Konawe	Desa Kampung Bunga, Kec. Lasolo

Sumber: Petunjuk teknis KIMBis (2011:13)

Penetapan lokasi kegiatan dilatarbelakangi pertimbangan pada ketersediaan potensi sumberdaya yang memadai dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan. Kabupaten Lamongan dipilih sebagai salah satu wilayah pelaksanaan Klinik IPTEK Mina Bisnis selain dilihat karena kondisi nelayan pesisir, juga potensi perikanan yang tinggi khususnya perikanan tangkap laut. Dipilihnya Desa Weru Kecamatan Paciran sebagai lokasi KIMBis disebabkan

oleh adanya potensi perikanan laut namun belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir khususnya masyarakat miskin. Perkembangan produksi perikanan sektor laut Kabupaten Lamongan menurut pelabuhan pelelangan ikan tahun 2013 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Produksi Perikanan Sektor Laut menurut Pelabuhan Pelelangan Ikan Tahun 2013

No.	Pelabuhan (PPI)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (juta Rp.)
1	Lohgung	340.50	3,982.28
2	Labuhan	799.20	9,346.94
3	Brondong/Blimbing	58,981.00	689,804.80
4	Kranji	5,438.50	63,605.29
5	Weru	4,590.80	53,691.12
Jumlah / Total		**70,150.00**	**820,430.42**
Tahun 2012		69,216.00	806,366.42
Tahun 2011		68,302.08	779,193.85
Tahun 2010		61,431.50	629,728.57
Tahun 2009		63,911.94	1,354,131.00
Tahun 2008		63,593.97	1,352,516.00
Tahun 2007		41,568.33	884,075.15
Tahun 2006		37,618.32	800,066.35
Tahun 2005		39,934.38	849,284.46

Sumber: *Lamongan dalam angka, 2014:276*

Berdasarkan perkembangan produksi perikanan, menunjukkan bahwa potensi perikanan tangkap Kabupaten Lamongan cukup besar dan mengalami peningkatan. Hal tersebut juga didukung adanya masyarakat di kedua kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Brondong, dan Paciran sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Total tenaga kerja perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2013 mencapai 74.345 orang, dengan 28.154 merupakan nelayan laut. Secara keseluruhan tenaga kerja terdiri dari nelayan laut, nelayan perairan umum, pembudidaya, pengolah dan *hatchery* (Lamongan dalam angka, 2014).

Melihat potensi dan ketersediaan, dapat dikatakan pesisir Kabupaten Lamongan dipandang sebagai kawasan dengan potensi perikanan yang melimpah. Sebaliknya, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan di pesisir Lamongan, ikan yang dihasilkan sebagian besar dijual begitu saja tidak ada nilai tambah dan kualitas produksi olahan. Seperti halnya desa Weru Kabupaten Lamongan sebagai lokasi pelaksanaan Klinik, hasil tangkap perikanan laut tergolong besar dan produk-produk olahan memang telah berkembang namun masih cenderung bernilai ekonomis rendah, sebab kreativitas dan produktifitas masyarakat rendah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Arif Soedjanarta (2012) selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) pada Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Lamongan:

> Sebenarnya selama ini masyarakat Desa Weru sudah banyak menghasilkan produk olahan dari ikan laut. Namun produk-produk itu masih berkualitas rendah karena menggunakan bahan baku yang kurang baik, proses produksi yang masih sederhana dan kurang higienis. Pasarnya masih terbatas lokal saja dan tanpa memiliki *branding* merek yang jelas (kompas.com: 2012).

Keberadaan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat nelayan dengan dibantu melalui intervensi paket teknologi Balitbang KP, dilakukan secara partisipatif oleh peneliti, penyuluh, dan pelaku usaha dengan bertujuan untuk menumbuhkan ataupun meningkatkan kewirausahaan kelompok masyarakat nelayan. Sehingga, pada akhirnya tercipta ekonomi yang berkembang berbasis IPTEK dalam mewujudkan industrialisasi perikanan dan kelautan.

Pemahaman cara kerja Klinik IPTEK Mina Bisnis ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Rogers dan Shoemaker (1971), bahwa pada konteks perubahan sosial melalui pengenalan ide-ide baru, pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik.

Melihat adanya manfaat yang bisa didapatkan dari keberadaan Klinik IPTEK Mina Bisnis dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan, juga berorientasi untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian. Maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyambut ditetapkannya lokasi Klinik IPTEK Mina Bisnis dengan diikutinya penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama, sebagai wujud kerjasama antara Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Lamongan dengan Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BALITBANG-KP) Nomor 24.1/BBPSEKP/TU. 330/2012 tertanggal 24 Mei 2012, tentang Operasionalisasi Klinik IPTEK Mina Bisnis untuk Diseminasi dan Pengawalan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BALITBANG-KP) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

Keberadaan semangat, naskah perjanjian kerjasama, serta komitmen kebertanggungjawaban pelaksanaan Klinik IPTEK Mina Bisnis di Desa Weru

Kecamatan Paciran, Lamongan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat nelayan. Berdasarkan harapan, teori serta potensi yang mendasari, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **"Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis" (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lamongan dan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).**

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan melalui komunikasi, advokasi/pendampingan, dan konsultasi.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value)* baik secara teoritis maupun praktis terhadap upaya Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) dalam meningkatkan kapasitas ekonomi nelayan melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi Akademik

a. Sebagai wacana kelembagaan dalam mendukung upaya peningkatan kehidupan nelayan yaitu Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis), dilihat dari aspek kekurangan dan kelebihannya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan berbasis Iptek.

b. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemberdayaan dengan maksud mensejahterakan masyarakat nelayan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Kontribusi Praktis

a. Dapat memberikan kontribusi akademis tentang studi pemberdayaan masyarakat nelayan. Dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam kelembagaan Klinik IPTEK Mina Bisnis.

b. Sebagai bahan diskusi bagi akademisi, praktisi, dan peminat administrasi publik khususnya bidang perencanaan pembangunan dan kajian pemberdayaan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian berkenaan dengan pentingnya pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis sebagai terobosan/alternatif upaya mengurangi kemiskinan nelayan dan meningkatkan kehidupan masyarakat nelayan. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dasar teori atau landasan berpijak yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat landasan pokok yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep pemberdayaan masyarakat. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan di lapangan baik data sekunder maupun primer.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, fokus penelitian ditetapkan pada kegiatan Klinik IPTEK Mina Bisnis menyangkut proses komunikasi, advokasi/pendampingan dan konsutasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan dan meliputi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data serta keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian terkait dengan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan berdasarkan hasil penyajian data dan analisis teoritis dari penulis, kemudian dalam bab ini juga diuraikan mengenai saran-saran untuk meningkatkan perkembangan Klinik IPTEK Mina Bisnis di Desa Weru Kabupaten Lamongan terutama faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan kelembagaan ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan.